

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 130/ PUU-XIII/ 2015
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN**

TESIS

Oleh:
ADE LUHUT SINULINGGA
201420251002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Implementasi Dan Implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 130/
PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan**

Nama Mahasiswa : Ade Luhut Sinulingga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251002

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Implementasi Dan Implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 130/
PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan**

Nama Mahasiswa : Ade Luhut Sinulingga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251002

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., , MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

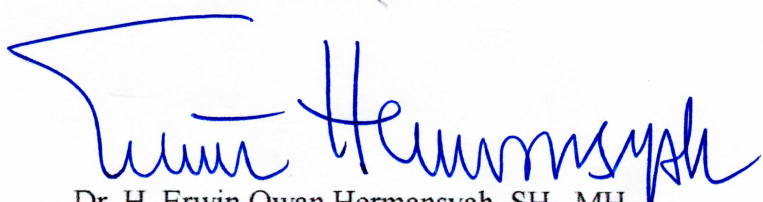
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

**Analisis Yuridis Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 130/PUU-XII/2015 Terhadap Proses Penyidikan.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta,

Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ade Luhut Sinulingga
201420251002

ABSTRAK

Pengujian Undang-Undang merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri bersifat final dan mengikat, sehingga apabila terdapat pengujian undang-undang yang permohonannya dinyatakan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka hasil putusan tersebut wajib dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait dalam materi yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kenyataannya tidak semua hasil putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 yang menguji mengenai ketentuan rumusan Pasal 14 huruf b dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam penulisan ini permasalahan yang hendak dibahas mengenai penetapan seseorang sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana umum sebelum adanya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 dan implementasi serta implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum.

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normative atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memisahkan antara penyelidikan dan penyidikan, hal ini dapat menyebabkan beberapa persoalan yaitu diantaranya, penanganan perkara menjadi lambat karena dalam tahap penyelidikan, penyidik sulit mendapatkan bukti karena tidak dapat melakukan upaya paksa, dan serta posisi penyidik rawan digunakan sebagai kesempatan untuk “bermain mata” antara terlapor dan penyidik.

Kata Kunci : Penyelidik, Penyidik, dan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Testing the Act is one of the authorities, the Constitutional Court. The decision of the Constitutional Court itself is final and binding so that if, there is a review of the law whose petition is declared granted by the Constitutional Court then the result of the decision shall be executed by the parties concerned in the material tested in the Constitutional Court Decision. In fact, not all the results of the Constitutional Court decision can be executed, one of which is the Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 which examines the provisions of the formulation of Article 14 letter b and Article 109 paragraph (1) KUHAP. In this paper the problems to be discussed about the determination of a person as a reporter or as a suspect in a general criminal case before the Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015, and the implementation and implications of Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 to the process general criminal investigation.

In this study using research methods juridical-normative. Normative juridical research method was a literature research of secondary data.

The conclusion of this research is the Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 has separated between investigation and investigation, this can cause some problems that is, the handling of the case becomes slow because in the investigation stage, the investigator is difficult to get the evidence because it can not make the forced effort, and a vulnerable investigator position is used as an opportunity to "play the eye" between the reporter and the investigator.

Keywords: *Investigator, Investigator, and Constitutional Court*

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan segenap pemikiran untuk menuliskan tulisan yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, serta masih banyak kekurangan dan kelemahan disana sini. Maka penulis sangat berterimakasih dan mengharapkan saran dan kritik guna mewujudkan sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta bimbingan juga pengetahuan, maka perkenankanlah penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof.Drs.Koesparmono Irsan, S.H,M.M.,MBA** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA** selaku Pembimbing II yang telah memberikan pemikiran dan waktunya serta terus memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
2. **Bapak Harli Siregar,S.H.,M.H.** selaku Kasubdit Pra Penuntutan Dit Kamneg dan para Staf Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dalam rangka penulis menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak **AKBP TARMADI, S.H., M.H.** dan Bapak **AIPTU PERMADI** yang senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam rangka wawancara agar penulisan tesis dapat penulis selesaikan.
4. Yang teristimewa, tercinta, tersayang, yang kuperjuangkan dan semangatku didalam hidup ini, yang selalu mendoakan penulis agar dalam keadaan sehat selalu, kupersembahkan tulisan ini kepada : istriku **Yunierly Gemala Morin.**

Semoga Doa, bantuan, semangat dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan upah yang lebih besar dari TUHAN YANG MAHA ESA.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya bilamana dalam kehidupan sehari-hari baik laku maupun ucap selama penulis menyelesaikan studi melakukan kesalahan dan kekeliruan, baik yang disengaja dan tidak disengaja. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana serta untuk mengetahui implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum.

Jakarta,

Juli 2018

Penulis

ADE LUHUT SINULINGGA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	18
1.4. Kerangka Teoritis.....	19
1.5. Kerangka Pemikiran	24
1.6. Kerangka Konseptual	25
1.7. Metode Penelitian.....	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Penelitian.....	26
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7.4. Teknik Analisis Data.....	27
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum	30
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	32

2.3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	37
2.4. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	38
2.5. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian dan Kejaksaan	40
2.5.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	40
2.5.2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	50
2.6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan	57
2.6.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana.....	57
2.6.2. Tinjauan tentang Penyelidikan.....	59
2.6.3. Tinjauan tentang Penyidikan.....	66
2.6.4. Tinjauan tentang Penuntutan	73
BAB III BAGAIMANA SESEORANG DISEBUT TERLAPOR ATAUPUN TERSANGKA DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XIII/2015 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM	85
3.1. Dasar Hukum Penggunaan Istilah Terlapor dan Tersangka	85
3.2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sebelum adanya Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 wawancara terkait Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum.	86
3.3. Wawancara terkait penggunaan istilah terlapor dan istilah Tersangka serta proses penanganan perkara tindak pidana umum	91
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM	
4.1. Implementasi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/ terhadap Standar Operasional Prosedur Penyidikan dan Administrasi Penyidikan.	97
4.2. Implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum	102

BAB V PENUTUP	106
5.1.Kesimpulan	106
5.2.Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

